

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program edukasi perlindungan perempuan dan anak oleh Dasawisma di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Melalui pendekatan kualitatif dan teori *street-level bureaucracy* dari Michael Lipsky, penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan kebijakan publik di tingkat akar rumput sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelaksana kebijakan menghadapi kondisi nyata di lapangan—dengan segala keterbatasan sumber daya, kompleksitas sosial, dan kebutuhan masyarakat.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi perlindungan perempuan dan anak yang dijalankan oleh Dasawisma telah berjalan dengan cukup baik dan memenuhi sebagian besar prinsip yang ditawarkan oleh Lipsky, terutama dalam hal diskresi, interaksi sosial, adaptasi terhadap konteks lokal, serta partisipasi masyarakat.

Pertama, interaksi dengan masyarakat terjalin secara intensif, komunikatif, dan bersifat informal. Kader Dasawisma menggunakan pendekatan yang berbasis kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat, yang membuat warga merasa nyaman untuk menerima informasi sekaligus menyampaikan masalah yang dihadapi. Interaksi ini memperkuat efektivitas program karena pesan-pesan perlindungan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Ini menguatkan argumen Lipsky bahwa pelaksana kebijakan menjadi aktor penting dalam membangun legitimasi kebijakan di tingkat bawah. Keputusan dalam program ini bersifat kolaboratif dan tidak hanya didominasi oleh pihak kelurahan. Warga dan unsur masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, penyusunan agenda, serta pemilihan metode edukasi. Hal ini menunjukkan bahwa ruang diskresi yang dimiliki pelaksana tidak digunakan secara sepihak, melainkan dikonsolidasikan melalui musyawarah warga. Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan merupakan praktik yang mencerminkan nilai demokratis dan kepekaan terhadap kondisi sosial yang beragam.

kualitas layanan, program ini berhasil menyediakan layanan edukatif yang bersifat ramah, mudah diakses, dan disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Pelayanan tidak semata-mata prosedural, melainkan juga memperhatikan kenyamanan psikologis dan etika komunikasi, terutama dalam menangani isu-isu sensitif seperti kekerasan domestik. Hal ini sesuai dengan teori Lipsky, bahwa pelaksana kebijakan yang baik bukan hanya mengikuti standar formal, tetapi juga mampu mengedepankan dimensi kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, **adaptasi kebijakan** dilakukan dengan sangat fleksibel. Kegiatan edukasi tidak terpaku pada satu model atau tempat, melainkan menyatu dalam kegiatan masyarakat seperti pengajian, arisan, atau kegiatan posyandu. Bentuk materi juga disesuaikan agar mudah dicerna oleh warga, misalnya melalui infografik, diskusi ringan, atau cerita keseharian. Kemampuan kader dalam menyesuaikan pelaksanaan program dengan kebutuhan warga memperlihatkan bahwa ruang diskresi digunakan sebagai sarana untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata, sebagaimana ditekankan oleh Lipsky.

Kelima, dari segi **akuntabilitas**, pelaksanaan program telah dilakukan secara bertanggung jawab dengan mekanisme pelaporan yang jelas. Evaluasi kegiatan dilakukan secara berkala, baik secara internal oleh kelurahan maupun dalam forum warga. Warga juga diberi ruang untuk menyampaikan masukan dan kritik. Meskipun sistem digital belum sepenuhnya optimal, namun semangat transparansi dan evaluatif sudah menjadi bagian dari praktik yang dijalankan.

Keenam, **partisipasi masyarakat** menunjukkan tren yang positif, meskipun belum menyeluruh. Warga, khususnya kelompok ibu-ibu, sudah menunjukkan antusiasme dalam mendukung dan terlibat langsung dalam kegiatan. Namun, partisipasi dari kalangan laki-laki dan remaja masih terbatas, sehingga perlu strategi khusus untuk memperluas basis partisipatif ke seluruh kelompok masyarakat. Partisipasi warga menjadi indikator penting bahwa program ini telah diterima secara sosial, meskipun tetap membutuhkan penguatan dan keberlanjutan.

Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa konsep *street-level bureaucracy* dari Michael Lipsky relevan diterapkan dalam konteks implementasi kebijakan sosial di tingkat kelurahan. Diskresi yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan terbukti menjadi alat yang efektif untuk menyesuaikan

kebijakan dengan kenyataan lokal. Namun, efektivitas pelaksana ini sangat tergantung pada kapasitas personal, komitmen sosial, dan dukungan kelembagaan yang tersedia. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada perumusan di tingkat atas, tetapi sangat ditentukan oleh praktik dan dinamika yang terjadi di tingkat bawah

5.2 Saran

Sebagai penutup dari penelitian ini, saran disusun untuk memberikan kontribusi yang bermakna, baik dalam ranah teoretis maupun praktis. Saran-saran ini tidak hanya dimaksudkan sebagai pelengkap dari temuan penelitian, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dalam menjembatani antara hasil kajian akademik dengan kebutuhan konkret di lapangan. Dalam konteks kebijakan publik, khususnya pada isu perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal, saran menjadi media strategis untuk memperkuat proses implementasi sekaligus memperkaya perspektif ilmiah terhadap dinamika birokrasi tingkat bawah.

Secara lebih spesifik, saran ini bertujuan untuk memperluas khazanah literatur akademik mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat akar rumput—wilayah yang kerap kali menjadi lokasi kritis, di mana rumusan kebijakan dari atas diuji dalam realitas sosial yang kompleks. Dalam konteks tersebut, saran ini menjadi bagian penting dari pengembangan teori implementasi kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial lokal, serta memperdalam pemahaman terhadap bagaimana aktor-aktor pelaksana kebijakan di level terbawah seperti kader Dasawisma dan perangkat kelurahan menafsirkan dan mengoperasikan kebijakan dalam ruang diskresi mereka.

Selain memberikan penguatan teoritis, saran juga diarahkan kepada pelaksana kebijakan di lapangan. Ini mencakup pemerintah kelurahan sebagai pemegang otoritas administratif, kader Dasawisma sebagai pelaksana teknis yang bersentuhan langsung dengan warga, serta lembaga-lembaga pendukung seperti PKK, Puskesmas, UPTD PPA, dan organisasi masyarakat yang memiliki mandat atau perhatian terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Para aktor ini berperan dalam menghubungkan struktur birokrasi formal dengan kebutuhan nyata

masyarakat yang kerap kali tidak terakomodasi dalam kerangka kebijakan nasional yang bersifat makro dan generalis.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini tidak bersifat normatif belaka, tetapi dirancang berdasarkan dinamika empirik yang ditemukan selama proses penelitian. Saran ini diharapkan menjadi rekomendasi yang aplikatif dan adaptif, serta dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berbasis komunitas. Harapannya, saran ini mampu memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program edukasi, serta memperluas dampak positifnya terhadap perlindungan perempuan dan anak, tidak hanya di Kelurahan Cakung Barat tetapi juga di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial serupa.

Dengan demikian, saran ini merupakan bagian penting dalam menjembatani dunia akademik dengan praktik kebijakan publik. Ia berfungsi sebagai jembatan pemikiran yang menghubungkan teori, pengalaman lapangan, dan harapan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan sosial yang adil, setara, dan berkelanjutan. Maka dari itu, pemanfaatan hasil penelitian ini tidak hanya diharapkan berguna bagi peneliti dan kalangan akademisi, tetapi juga menjadi referensi strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada kelompok rentan di tingkat lokal.

5.2.1 Saran Teoretis

Dari hasil penelitian ini, dapat diidentifikasi sejumlah kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan kajian akademik dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait implementasi kebijakan di tingkat akar rumput. Penelitian ini mengangkat bagaimana pelaksanaan program edukasi perlindungan perempuan dan anak di Kelurahan Cakung Barat tidak hanya menjadi praktik pelayanan publik semata, tetapi juga menjadi ruang nyata bagi beroperasinya dinamika birokrasi tingkat bawah yang kompleks, penuh tantangan, dan sarat penyesuaian terhadap realitas sosial yang ada.

Secara konseptual, teori street-level bureaucracy yang dikemukakan oleh Michael Lipsky menjadi kerangka berpikir utama dalam memahami bagaimana pelaksana kebijakan di tingkat bawah tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan dari pembuat kebijakan pusat, melainkan juga menjadi aktor penentu yang memiliki kewenangan diskresi dalam merespons kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam konteks ini, penelitian ini mempertegas kembali bahwa pelaksanaan kebijakan tidak selalu bersifat linier dari atas ke bawah (top-down), tetapi sering kali mengalami modifikasi, adaptasi, bahkan reinterpretasi oleh pelaksana di lapangan agar kebijakan dapat berjalan dan diterima oleh masyarakat.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa pelaksana kebijakan dalam hal ini diwakili oleh kader Dasawisma tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memainkan peran sosial, budaya, dan psikologis dalam menghadapi beragam tantangan lapangan. Mereka harus mampu menjembatani antara norma formal dalam kebijakan dan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Hal ini memberikan ruang reflektif bagi pengembangan teori implementasi kebijakan yang lebih kontekstual, dengan memasukkan dimensi kultural dan gender dalam praktik birokrasi publik di level komunitas.

Oleh karena itu, saran teoretis dari penelitian ini diarahkan untuk memperluas cakupan dan kedalaman teori Lipsky, serta mendorong studi-studi akademik ke depan agar lebih peka terhadap kondisi lokal, keragaman pelaksana, dan dinamika sosial yang mempengaruhi bentuk akhir dari sebuah kebijakan di masyarakat. Saran ini diharapkan dapat memperkuat integrasi antara teori implementasi kebijakan publik dengan realitas sosial-budaya Indonesia yang majemuk.

Secara praktis, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana kebijakan, khususnya Pemerintah Kelurahan, kader Dasawisma, dan lembaga-lembaga pendukung di tingkat lokal, agar pelaksanaan program edukasi perlindungan perempuan dan anak semakin efektif dan berdampak nyata. Penguatan kerangka teori Lipsky dalam konteks lokal

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori Michael Lipsky sangat aplikatif untuk menganalisis kebijakan di tingkat kelurahan di Indonesia. Oleh karena itu,

studi-studi selanjutnya dalam bidang administrasi publik dapat mengeksplorasi lebih lanjut peran diskresi, beban kerja, serta dinamika informal pelaksana kebijakan dalam konteks pemerintahan desa atau kelurahan yang sering kali bersifat hibrid (formal dan nonformal).

Kontribusi terhadap kajian kebijakan partisipatif . Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan partisipatif, khususnya dalam kebijakan yang menysasar kelompok rentan. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi hubungan antara partisipasi warga dan legitimasi kebijakan secara lebih mendalam, serta bagaimana nilai-nilai lokal memengaruhi efektivitas implementasi.

Integrasi perspektif gender dalam kebijakan local Kajian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan teori administrasi publik berbasis gender, di mana peran perempuan sebagai pelaksana dan penerima manfaat kebijakan menjadi pusat perhatian. Penelitian lebih lanjut dapat memperluas analisis pada bagaimana struktur patriarki mempengaruhi ruang gerak pelaksana perempuan dalam birokrasi lokal.

5.2.2 Saran Praktis

Selain memberikan kontribusi pada tataran teoretis, penelitian ini juga menghasilkan berbagai temuan yang memiliki relevansi langsung terhadap praktik penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam implementasi program edukasi perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan. Dalam konteks birokrasi publik di Indonesia, pelaksanaan kebijakan di tingkat paling bawah—seperti yang dilakukan oleh kelurahan dan kader Dasawisma—merupakan garda terdepan yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program. Oleh karena itu, penting bagi setiap rekomendasi praktis yang dihasilkan dari penelitian ini untuk disusun secara aplikatif, kontekstual, dan mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi oleh para pelaksana kebijakan.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan keterlibatan masyarakat yang aktif, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaksana di tingkat kelurahan. Tantangan tersebut antara lain menyangkut keterbatasan sumber daya manusia,

kurangnya pelatihan teknis, hambatan budaya dan sosial dalam menyampaikan isu-isu sensitif, serta belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis partisipasi warga. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga menyentuh aspek sosiologis dan psikologis yang membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, saran praktis yang disusun dalam bagian ini diarahkan sebagai respons terhadap tantangan-tantangan tersebut. Rekomendasi disusun berdasarkan prinsip partisipatif, berbasis kebutuhan lokal, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi pendukung lainnya. Saran-saran ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki pelaksanaan program secara jangka pendek, tetapi juga dirancang untuk mendukung keberlanjutan program dalam jangka panjang, melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kesadaran kolektif masyarakat.

Lebih dari sekadar panduan teknis, saran praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemantik perubahan sosial yang lebih luas. Melalui penguatan fungsi edukasi di tingkat komunitas, pelibatan warga secara aktif, serta dukungan regulasi dan pendanaan yang memadai, program edukasi perlindungan perempuan dan anak tidak hanya menjadi kegiatan rutin kelurahan, tetapi dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menciptakan ruang aman dan setara bagi perempuan dan anak di lingkungan tempat tinggal mereka.

Dengan semangat tersebut, saran-saran praktis berikut disampaikan untuk memperkuat kerja-kerja pelaksana di tingkat lokal, menjadikan kebijakan lebih inklusif dan responsif, serta memastikan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan dapat terwujud tidak hanya sebagai wacana, tetapi sebagai kenyataan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

1. Peningkatan Kapasitas peningkatan kader Dasawisma

Pemerintah kelurahan dan dinas terkait perlu memberikan pelatihan berkelanjutan kepada kader Dasawisma mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, teknik komunikasi publik, serta penggunaan media digital untuk edukasi. Hal ini penting agar mereka mampu menjalankan

tugasnya dengan pendekatan yang profesional, kontekstual, dan berbasis bukti.

2. **Diversifikasi dan Inovasi Metode Edukasi**

Pelaksanaan program sebaiknya tidak terpaku pada metode tatap muka konvensional. Perlu dilakukan inovasi seperti penyebaran informasi melalui media sosial, podcast lokal, video pendek, atau integrasi dalam kurikulum sekolah dan kegiatan karang taruna agar menjangkau kelompok usia dan gender yang lebih luas.

3. **Penguatan sistem evaluasi berbasis partisipasi**

Pemerintah kelurahan perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya menilai output program, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan. Evaluasi sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan warga sebagai evaluator sehingga prosesnya lebih demokratis dan transparan.

4. **Perluasan jangkauan program kepada laki-laki dan remaja**

Mengingat bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama, maka edukasi juga harus menasar kelompok laki-laki dan anak muda. Program khusus seperti diskusi kelompok ayah (father group) atau pelatihan remaja sebagai duta perlindungan anak dapat menjadi strategi untuk membangun kesadaran yang lebih merata.

5. **Alokasi anggaran dan dukungan regulasi**

Keberlanjutan program sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai dan adanya kebijakan lokal yang berpihak pada isu perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah kelurahan diharapkan dapat menyusun peraturan kelurahan (perkels) yang menjadi payung hukum pelaksanaan program ini secara berkelanjutan.

6. **Replikasi model program ke wilayah lain**

Jika program ini telah dievaluasi secara menyeluruh dan menunjukkan hasil yang positif, maka dapat dijadikan sebagai model praktik baik yang bisa diterapkan di wilayah kelurahan lain di Jakarta Timur maupun kota-kota padat penduduk lainnya,

Namun, replikasi harus dilakukan dengan pendekatan adaptif yang memperhatikan kekhasan sosial masing-masing wilayah.

